

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelaksanaan otonomi daerah pada masa orde baru dimulai saat terbentuknya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Meskipun harus diakui bahwa dalam praktiknya kurang mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan kata lain masih menjalankan sentralisasi. Hal itu disebabkan karena ketergantungan pemerintahan daerah yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Untuk memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru, kemudian diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah masa orde baru berakhir.

Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 kembali disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Begitu halnya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang juga disempurnakan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Ini dimaksudkan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dapat mengedepankan otonomi yang luas dan bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah untuk tercapainya *good governance* (Mardiasmo, 2009 dalam Heriningsih, 2015).

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD dilaporkan kepada Pemerintah menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunannya. Dengan demikian semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah dapat diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) baru atau memindahkan KKN dari tingkat pusat ke daerah (Siahaan, 2004 dalam Setiawan, 2012).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Karena masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut,

tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002 dalam Putra, 2013).

Sebagai alat pertanggungjawaban, LPPD merupakan sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 menyebutkan bahwa EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk.

EKPPD menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan sistem kinerja untuk membandingkan antar daerah dan mengetahui tingkat perkembangan atau keberhasilan kinerja masing-masing pemerintah daerah dengan tahun sebelumnya secara nasional. Hasil EKPPD salah satunya berupa Laporan Hasil Pemeringkatan dan status daerah yang disusun berdasarkan peringkat, skor dan status.

Memiliki kesamaan tujuan dengan Pemerintah yaitu mengukur tingkat kemajuan dan pencapaian daerah yang mampu diakses oleh semua orang, Indonesia Governance Index (IGI) memiliki enam prinsip yang paling sesuai dengan kondisi sosial politik di Indonesia saat ini. Keenam prinsip tersebut adalah partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi

dan efektifitas. Secara khusus bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintahan lokal/regional Indonesia melalui suatu tujuan, akurat, komprehensif dan dengan cara dibandingkan. Dalam Executive Report Indonesia Government Index 2012 menyebutkan bahwa IGI digagas oleh Kemitraan sebagai upaya untuk membantu meningkatkan efektifitas dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000). Sehingga salah satu cara untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah berhasil menjalankan kewajibannya dengan baik atau tidak adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja. Selain untuk kepentingan masyarakat, pengukuran kinerja juga menjembatani perbedaan karakteristik setiap daerah dalam sebuah pengukuran. Pengukuran tersebut menjadi pembanding kemajuan dan prestasi dengan daerah lain. Lalu diharapkan

dapat menimbulkan persaingan yang membuat setiap daerah belajar bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada yang menggunakan indeks pengukuran kinerja pada IGI sebagai variabel. Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012) menggunakan ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan audit sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan Putra (2013) menggunakan Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Anggaran sebagai variabel yang mempengaruhi Kinerja Manajerial SKPD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya kedalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012”**.

B. Perumusan Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah indeks Akuntabilitas pada Indonesia Governance Index berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada provinsi di Indonesia tahun 2012?
2. Apakah indeks Efisiensi pada Indonesia Governance Index berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada provinsi di Indonesia tahun 2012?

3. Apakah indeks Efektifitas pada Indonesia Governance Index berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada provinsi di Indonesia tahun 2012?

C. Batasan Permasalahan

Batasan dari penelitian ini adalah indeks pemerintah pada Indonesia Governance Index yang mencakup indeks Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Serta EKPPD pada tahun 2014 untuk LPPD tahun 2012.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh variabel bebas (indeks Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas) terhadap variabel dependen yaitu skor kinerja penyelenggaraan pemerintah, sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh antara indeks Akuntabilitas pada Indonesia Governance Index terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi di Indonesia tahun 2012.
2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh antara indeks Efisiensi pada Indonesia Governance Index terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi di Indonesia tahun 2012.

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh antara indeks Efektivitas pada Indonesia Governance Index terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi di Indonesia tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan peneliti khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan mengetahui sejauh mana kinerja pemerintahan daerah setempat dibandingkan dengan daerah yang lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dan pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai kinerja pemerintahan terkait dengan Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas dalam pelayanan publik sebagai pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah.
4. Bagi pemerintah, dengan adanya pengukuran kinerja dapat memudahkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu meningkatkan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi meliputi lima bab yang sistematika penulisannya meliputi:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan pokok permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, kajian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis dari penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang populasi, sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel dan metode analisis data. Serta jenis dan sumber data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan juga saran baik bagi pemerintah maupun bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam menjalankan pemerintahannya, ada beberapa asas penting dalam Undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami. Asas otonomi tersebut antara lain:

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

d. Perimbangan keuangan adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Halim (2001) dalam Adhiantoko (2013) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (a) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya; (b) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002 dalam Puspitasari, 2014):

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah dengan menggunakan asas desentralisasi mempunyai manfaat antara lain (Kaho, 1998 dalam Puspitasari, 2014):

- (a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan;
- (b) dalam menghadapi masalah mendesak, perlu membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi instruksi dari pusat;
- (c) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan;
- (d) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan bagi kepentingan tertentu;
- (e) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986 dalam Adhiantoko, 2012):

- a. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

b. Kemampuan aparatur pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana

untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 dalam Adhiantoko, 2013). Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Parker (1996) dalam Sadjiarto (2000) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

- a. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.
- b. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.
- c. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.
- d. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.
- e. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Laporan tersebut digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan

membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintah daerah atas permintaan Pemerintahan, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Untuk menyempurnakan PP No. 6 Tahun 2008, perlu menetapkan Permendagri No. 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). EKPPD dilaksanakan berdasarkan asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil EKPPD tahunan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom. EKPPD merupakan sistem pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci

(IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. EKPPD menggunakan IKK dengan sistem pengukuran kinerja untuk membandingkan antar provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional disusun berdasarkan peringkat, skors dan status. Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota sewilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range yang terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu;

Tabel II.1
Kriteria Penetapan Status

Indeks EKPPD	Status
4,00 – 3,00	Sangat Tinggi
2,99 – 2,00	Tinggi
1,99 – 1,00	Sedang
0,99 – 0,00	Rendah

Sumber: Kemendagri No 73 Tahun 2009

3. Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2006) dalam Putra (2013) akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002) dalam Setiawan (2012) menyebutkan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas horisontal (*horisontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* dalam Sadjiarto (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap sumber daya finansial, kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan dan hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2005) dalam Darwanis (2013) menyebutkan bahwa dimensi tersebut adalah :

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

4. Efektifitas

Pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) dalam Puspitasari (2014) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Ihyaul (2009) dalam Julita (2015) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran atau *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Julita, 2015).

5. Efisiensi

Pengertian Efisiensi menurut Malayu (2003) dalam Puspitasari (2014) adalah perbandingan terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang tercapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan

(Medi, 1966 dalam Julitawati et al., 2012). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara; (a) menaikkan *output* untuk *input* yang sama; (b) menaikkan *output* lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*; (c) menurunkan *input* untuk *output* yang sama (Julitawati, 2015).

6. Indonesia Governance Index

Indonesia Governance Index mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis). Berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan tersebut, secara operasional, terdapat 4 (empat) arena tata kelola, yaitu a) Pemerintah (*political office/pejabat politik*); b) Birokrasi; c) Masyarakat Sipil; d) Masyarakat Ekonomi. Empat arena ini memiliki fungsi dan kinerja yang secara kolektif menentukan kualitas tata kelola di setiap provinsi.

Evaluasi bersamaan faktor ini di daerah sangat penting untuk menilai tingkat kemajuan dan pencapaian daerah tertentu untuk tahun

tertentu dan untuk membuat perbandingan kemajuan dan prestasi antar wilayah dalam satu area (Pulau misalnya) serta di tingkat nasional.

Fokus pengukuran IGI adalah pemerintah daerah karena, setelah pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah di ujung tombak dalam pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam perumusan kerangka kerja dan kebijakan yang pada akhirnya akan menentukan arah dan laju pembangunan daerah peraturan.

Secara khusus, IGI ditujukan untuk mengukur kinerja pemerintah (jabatan politik), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan skala penilaian berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik). Secara lebih rinci, kisaran skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel II.2
Skala Indeks IGI

Skala	Kriteria
1,00 – 2,29	Sangat Buruk
2,30 – 3,57	Buruk
3,58 – 4,86	Cenderung Buruk
4,87 – 6,14	Sedang
6,15 – 7,43	Cenderung Baik
7,44 – 8,71	Baik
8,72 – 10,00	Sangat Baik

Sumber: www.kemitraan.or.id

B. Kajian Penelitian Sebelumnya

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pertama Hanipah dan Pratomo (2015) dengan judul “Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013)”. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan verifikatif bersifat kausalitas dengan pendekatan studi kasus. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposivse sampling* dengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung, Laporan Realisasi PKB, Laporan Target dan Biaya PKB tahun 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Variabel dependen yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel independen yang diteliti adalah efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini adalah Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi PKB secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara secara parsial Efektifitas PKB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi PKB tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Kontribusi PKB berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Mustikarini dan Firtriasari (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007”. Jumlah sampel sebanyak 275 Pemda kabupaten/kota.

Penelitian ini menggunakan data *cross section*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Variabel dependen yang diteliti adalah kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. Variabel independen yang diteliti adalah ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Pemerintah Daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sementara itu, temuan audit BPK dan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan.

Ani dan Dwirandra (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota”. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *sampling jenuh* dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah 9 kabupaten/kota di provinsi Bali. Variabel dependen yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Variabel independen yang diteliti adalah kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Bali yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

sedangkan rasio efektifitas, rasio efisiensi dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya antara kinerja keuangan terhadap pengangguran, menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan rasio efektifitas, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasthoro, Sarnowo dan Nurwiyanta (2016) melakukan penelitian dengan judul "*The Impact of Financial Condition on Public Governance among Provincial Government in Indonesia*". Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat I (propinsi) di Indonesia. Metode sampling yang digunakan adalah *sensus*, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Variabel dependen yang diteliti adalah tata pamong pemerintahan daerah. Variabel independen yang diteliti adalah *Shortterm Solvency*, *Financial Flexibilit* dan umur Pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Shortterm Solvency* dan umur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tata pamong pemerintahan propinsi di Indonesia. Sedangkan *Financcal Flexibility* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tata pamong pemerintahan propinsi di Indonesia.

Sucahyo dan Heriningsih (2015) melakukan penelitian dengan judul “Kajian Empiris tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Tingkat Penyelenggaraan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia”. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 36 kabupaten dan kota yang memiliki indeks persepsi tahun 2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel dependen yang diteliti adalah tingkat korupsi di pemerintah daerah. Variabel independen yang diteliti adalah opini audit, tingkat kelemahan SPI, tingkat ketaatan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat korupsi, tingkat kelemahan SPI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat korupsi, ketaatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perundang-undangan dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perundang-undangan.

Darwanis dan Chairunnisa (2013) melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh SKPA yang ada di provinsi Aceh berjumlah 39 SKPA. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yang terdiri dari Kepala Bidang Program dan Pelaporan, Kepala Seksi pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan Kepala Sub bagian keuangan

yang berjumlah 102 responden. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda. Variabel dependen yang diteliti adalah Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. Variabel independen yang diteliti adalah Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan Kualitas Laporan keuangan Instansi Pemerintah dan Kejelasan Sasaran Anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan a) Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh; b) Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh; c) Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh; d) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.

Putra (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah”. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *judgment sampling*, dengan jumlah responden 135. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Pimpinan dan Kepala Bagian pada setiap SKPD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Hasthoro dan Sunardi (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 pemerintah daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari 46 kota, 4 kabupaten dan 1 provinsi. Data yang berhasil dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Transparansi, Akuntabilitas, Budaya Hukum dan Partisipasi. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah secara serentak (bersama) seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Budaya hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dan ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, berikut ringkasannya:

Tabel II.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul Penelitian	Sample	Variabel	Hasil Penelitian
Septiani Hanipah, Dudi Pratomo, SET.,M.Ak (2015) Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013)	60 Sampel dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung, Laporan Realisasi PKB, Laporan Target dan Biaya PKB tahun 2009-2013	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi PKB secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektifitas PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi PKB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Kontribusi PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Widya Astuti Mustikarini Debby Fitriyani (2012) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007	275 Pemda daerah kabupaten/kota	Variabel dependen: kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. Variabel independen: ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan	Ukuran Pemerintah Daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Temuan audit BPK dan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan.

		audit.	
Ni Luh Nana Putri Ani A. A. N. B. Dwirandra (2014) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota	8 kabupaten 1 kota di Provinsi Bali	Variabel Dependen: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Variabel Independen: kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Bali yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan	Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, dan rasio efektifitas, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Handoko A. Hasthoro, Henry Sarnowo, Nurwiyanta (2016) <i>The Impact of Financial Condition on Public Governance among Provincial Government in Indonesia</i>	Pemerintah propinsi di Indonesia tahun 2012.	Variabel Dependen: tata pamong pemerintahan daerah. Variabel Independen: <i>Shortterm Solvency, Financial Flexibilit</i> dan umur Pemerintah daerah.	<i>Shortterm Solvency</i> dan umur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tata pamong pemerintahan propinsi di Indonesia. Sedangkan, <i>Financial Flexibility</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tata pamong pemerintahan propinsi di Indonesia.
Sucahyo Heriningsih (2015) Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas	36 kabupaten dan kota di Indonesia	Variabel Dependen: tingkat korupsi di pemerintah daerah.	Opini Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat korupsi, tingkat kelemahan SPI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat korupsi, ketaatan berpengaruh

Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia		Variabel Independen: opini audit, tingkat kelemahan SPI, tingkat ketaatan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	positif tidak signifikan terhadap perundang-undangan dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perundang-undangan.
Darwanis dan Sephi Chairunnisa (2013) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Seluruh SKPA yang ada di provinsi Aceh berjumlah 39 SKPA. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yang berjumlah 102 responden.	Variabel dependen: Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. Variabel independen: Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan Kualias Laporan keuangan Instansi Pemerintah dan Kejelasan Sasaran Anggaran.	Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.
Deki Putra (2013) Pengaruh Akuntabilitas dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja	Populasi: SKPD Kota Padang. Responden berjumlah 135. Dengan menyebarkan kuesioner kepada Pimpinan dan Kepala Bagian	Variabel dependen: Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Variabel independen: Akuntabilitas Publik dan	Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Perangkat Daerah	pada setiap SKPD.	Kejelasan Sasaran Anggaran.	
Handoko A. Hastoro , Sunardi (2016) Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	46 kota, 4 kabupaten dan 1 provinsi	Variabel dependen: Kinerja keuangan Pemda Variabel independen: Transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan partisipasi Variabel kontrol: Ukuran pemerintah daerah	Secara serentak seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Budaya hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dan ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

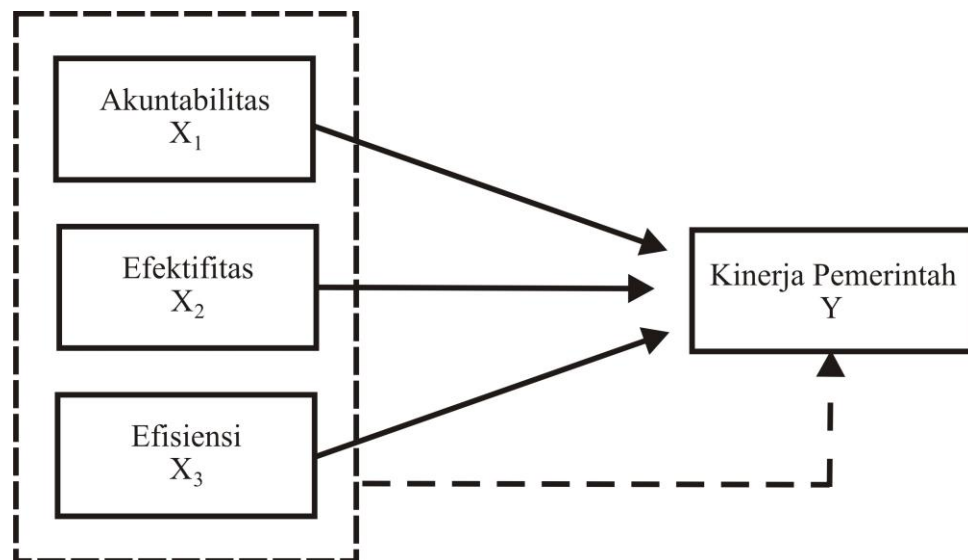
Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengulas tentang pengaruh akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga variabel ini merupakan sebagian dari prinsip untuk mengukur tata kelola pada Indonesia Governance Index (IGI). Berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan, secara operasional terdapat 4 (empat) arena tata kelola, yaitu (1) pemerintah; (2) birokrasi; (3) masyarakat sipil; (4) ekonomi bisnis. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan arena pemerintah agar lebih terfokus pada kinerja

pemerintahan daerah yang selanjutnya akan digunakan sebagai variabel penelitian. Untuk mengukur penilaian kinerja menggunakan skala 1 (terendah) sampai 10 (tertinggi), serta untuk melihat keunggulan dari pemerintahan dalam satu provinsi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Penelitian ini juga menggunakan hasil EKPPD 2014 untuk LPPD 2012 yang berupa peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2012.

Hasil pengujian akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat menggambarkan bagaimana hubungan antar variabel. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian

D. Hipotesis

1. Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi publik bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta *responsive* terhadap publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, tetapi publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

H_1 : Indeks Akuntabilitas pada Indonesia Governance Index berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

2. Efisiensi dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Efisiensi adalah kondisi dimana kebijakan dan program yang dijalankan telah menggunakan sumberdaya manusia, keuangan dan waktu secara optimal. Pengukuran kinerja berdasarkan efisiensi, berarti menitikberatkan pada realisasi kegiatan pemerintahan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Sehingga semakin kecil hasil yang diperoleh, maka kinerja pemerintahan juga semakin baik.

H₂: Indeks Efisiensi pada Indonesia Governance Index berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan.

3. Efektifitas dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Efektifitas adalah kondisi dimana tujuan kebijakan dan hasil program telah dicapai sesuai dengan yang tujuan yang diharapkan (yaitu merujuk pada mandat konstitusi masyarakat yang cerdas, makmur, adil dan beradab menjadi parameter utama). Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap kegiatan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam setiap kegiatan. Semakin besar tingkat efektifitas yang dicapai, maka semakin tinggi juga kinerja pemerintah.

H₃: Index Efektifitas pada Indonesia Governance Index berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian merupakan atribut atau sifat yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999 dalam Setiawan, 2012). Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian yaitu variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*). Tiga variabel yang menjadi variabel independen, yaitu akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Variabel-variabel tersebut selanjutnya akan diuji secara sistematis.

1. Variabel Dependen

Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran, 2006 dalam Setiawan 2012). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hampir semua pemangku kepentingan telah sepenuhnya mengakui pentingnya mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan dengan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja yang sesuai tanpa mengurangi kekhasan antara

daerah. Dari hasil pengukuran kinerja, setiap pemerintah daerah mampu membandingkan kemajuan dan prestasi dengan daerah lain. Sehingga memberikan referensi untuk meningkatkan kinerja daerah mereka.

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional.

Sistem pengukuran kinerja mencakup indikator kinerja kunci, teknik pengumpulan data kinerja, metodologi pengukuran kinerja dan analisis, pembobotan dan interpretasi kinerja.

2. Variabel Independen

Variabel Bebas (*Independent Variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran, 2006 dalam Setiawan 2012). Variabel bebas dari penelitian ini adalah akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas yang merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja IGI.

IGI dihasilkan dari komposit dua tipe data, yaitu data obyektif (sekunder) dan data persepsi/subyektif (primer). Data obyektif terdiri dari berbagai dokumen resmi dan terpublikasi, seperti data statistik,

APBD, RPJMD, RKA, LKPJ, PPUAS/KUA, Dalam Angka, catatan-catatan kegiatan dan sebagainya. Sementara itu, data persepsi diperoleh dari narasumber yang dipilih melalui kriteria ketat yang berkenaan dengan keahlian maupun memiliki informasi yang luas terkait indikator-indikator yang diukur serta melalui penilaian langsung setiap peneliti di provinsi berdasarkan kajian yang obyektif. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi sehingga dapat memperkuat kualitas data IGI.

Tabel III.1

Daftar Indikator IGI

Indikator	Objektif	Penilaian	Kuesioner	Bobot
AKUNTABILITAS				
Kesesuaian Target Capaian Prioritas RPJMD dengan Capaian Tahunan Pemerintah Provinsi dalam LKPJ	V			0.342
Rasio Realisasi pengesahan perda dibandingkan dengan jumlah rencana legislasi daerah (dalam %)	V			0.129
Rasio APBD Perubahan terhadap APBD Penetapan Tanpa Adanya Perubahan Asumsi Dasar	V			0.105
Ketepatan waktu dalam pengesahan Perda APBD	V			0.190
Rasio Belanja Hibah/Subsidi dan Bantuan Sosial terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal	V			0.110
Komitmen anggota DPRD memperjuangkan			V	0.124

kepentingan/aspirasi publik				
EFISIENSI				
Waktu Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Implementasi PERDA	V			0.167
Rata-rata waktu penyelesaian Perda di DPRD dalam 1 tahun terakhir	V			0.167
Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak Langsung) terhadap Total APBD	V			0.463
Rasio Total Budget DPRD terhadap Total APBD	V			0.202
EFEKTIFITAS				
Jumlah Perda Inisiatif	V			0.059
Regulasi tentang Perlindungan Lingkungan Hidup		V		0.084
Tingkat Pertumbuhan PDRB/kapita	V			0.082
Tingkat kemiskinan	V			0.182
Tingkat Pengurangan pengangguran terbuka	V			0.222
Tingkat kesenjangan (gini ratio)	V			0.169
Prosentase perempuan di parlemen	V			0.047
Disparitas Pendapatan antar Kabupaten dalam Provinsi (Indeks Wiliamson)	V			0.086
Rasio Total APBD Realisasi terhadap Total APBD Perubahan	V			0.069

Sumber: www.kemitraan.or.id

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 provinsi.

2. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel menggunakan metode sensus yaitu teknik penyampelan bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010 dalam Ani dan Dwirandra, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2012.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui keterangan, catatan, dokumentasi, website/situs resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi (Setiawan, 2012). Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan: (1) lebih mudah diperoleh; (2) biaya lebih murah; (3) sumber data adalah lembaga terpercaya (Kemitraan dan Kementrian Dalam Negeri) sehingga data terbukti keabsahannya.

Data diperoleh dari *Executive Report Indonesia Governance Index 2012* yang berjudul “*Towards A Well-Informed Society and Responsive*

Government” melalui website resmi Kemitraan dan dari laporan EKPPD 2014 untuk LPPD tahun 2012 melalui website resmi Kementerian Dalam Negeri.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi merupakan proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen tersebut (Setiawan, 2012). Proses perolehan dokumen dilakukan melalui website resmi dengan lembaga terkait Kemitraan dan Kemendagri. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple regression model*) untuk menguji akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Model penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Kinerja = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Efisiensi

X_3 = Efektifitas

β_0 = konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dilakukan pengujian penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian di bawah ini:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai karakter variabel penelitian. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, standar deviasi dan kisaran skor (maksimum dan minimum) yang ditampilkan dalam tabel statistik deskriptif menggunakan *Software IBM SPSS V.22*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal *p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen menggunakan *Software IBM SPSS V.22*, dimana:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolinieritas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinieritas atau tidak adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas adalah dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Menurut Ghozali (2011), model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1 atau VIF di bawah 10. Apabila nilai *tolerance* di bawah 0,1 atau VIF di atas 10, maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Uji Autokorelasi untuk menguji ada tidaknya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan melalui waktu (*data time series*) atau ruang (*data cross section*) dalam suatu model regresi. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah tidak dimasukkannya variabel bebas yang lain. Pengujiannya, dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (Dw).

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Ghazali (2006) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homokedastisitas, dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui gejala Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik Scatter Plot (SP) melalui *Software IBM SPSS V.22*. Model yang bebas dari Heteroskedastisitas mempunyai grafik SP dengan pola titik yang menyebar di atas sumbu Y. Dasar analisisnya adalah :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik yang tidak teratur dan berada di menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka mengidentifikasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Keterandalan Model (Uji F)

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel

bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujianya seperti *One Way Anova*. Apabila nilai *prob.* F hitung (*ouput* SPSS ditunjukkan pada kolom *sig.*) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai *prob.* F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

b. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi-t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai *prob.* t hitung (*ouput* SPSS ditunjukkan pada kolom *sig.*) lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (dari t hitung tersebut) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai *prob.* t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

4. Uji Determinasi

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas serta variabel dependen berupa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bantuan *Software IMB SPSS V.22*. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen maka penulis menggunakan *Adjusted R square* ($Adj R^2$) seperti yang dinyatakan oleh Ghozali (2006) dalam Ratnasari (2009).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sensus, yaitu dengan menggunakan seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Menurut Musfiqon (2012) dalam Hanipah dan Pratomo (2015) statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan melihat aspek rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil perhitungan deskriptif pengaruh Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama periode penelitian Tahun 2012 disajikan dalam tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1,37	3,06	2,24	0,37
Akuntabilitas	2,46	8,37	5,45	1,19
Efisiensi	5,01	9,40	7,51	1,12
Efektifitas	4,15	7,97	5,49	0,94
Valid N (listwise)	33			

Sumber: Data Statistik diolah IMB SPSS V.22

Berdasarkan Tabel IV.1, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terendah memiliki skor sebesar 1,37 yang diperoleh oleh provinsi Maluku Utara dan skor maksimum sebesar 3,06 yang diperoleh oleh provinsi Jawa Timur. Nilai mean kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2,24 dengan standar deviasi 0,37. Hal itu berarti bahwa rata-rata skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang didapat sebesar 2,24 yang termasuk dalam status tinggi dalam indeks EKPPD.

Akuntabilitas dalam Tabel IV.1 tersebut memiliki nilai minimum sebesar 2,46 yang diperoleh provinsi Papua Barat dan nilai maksimum sebesar 8,37 yang diperoleh provinsi Yogyakarta. Nilai mean akuntabilitas adalah 5,45 dengan standar deviasi sebesar 1,19. Hal itu berarti rata-rata akuntabilitas tiap provinsi adalah 5,45 yang termasuk dalam kriteria sedang dalam skala penilaian IGI.

Berdasarkan Tabel IV.1, efisiensi memiliki nilai minimum sebesar 5,01 yang diperoleh provinsi Bengkulu dan nilai maksimum sebesar 9,40 yang diperoleh provinsi Papua Barat. Nilai mean efisiensi sebesar 7,51 dengan standar deviasi 1,12. Hal itu berarti rata-rata efisiensi tiap provinsi sebesar 7,51 yang termasuk dalam kriteria baik dalam skala penilaian IGI.

Efektifitas dalam Tabel IV.1 tersebut memiliki nilai minimum sebesar 4,15 yang diperoleh provinsi DKI Jakarta dan nilai maksimum sebesar 7,97 yang diperoleh provinsi Maluku. Nilai mean efektifitas sebesar 5,49 dengan standar deviasi sebesar 0,94. Hal itu berarti rata-rata efektifitas tiap provinsi sebesar 5,49 yang termasuk dalam kriteria sedang dalam skala penilaian IGI.

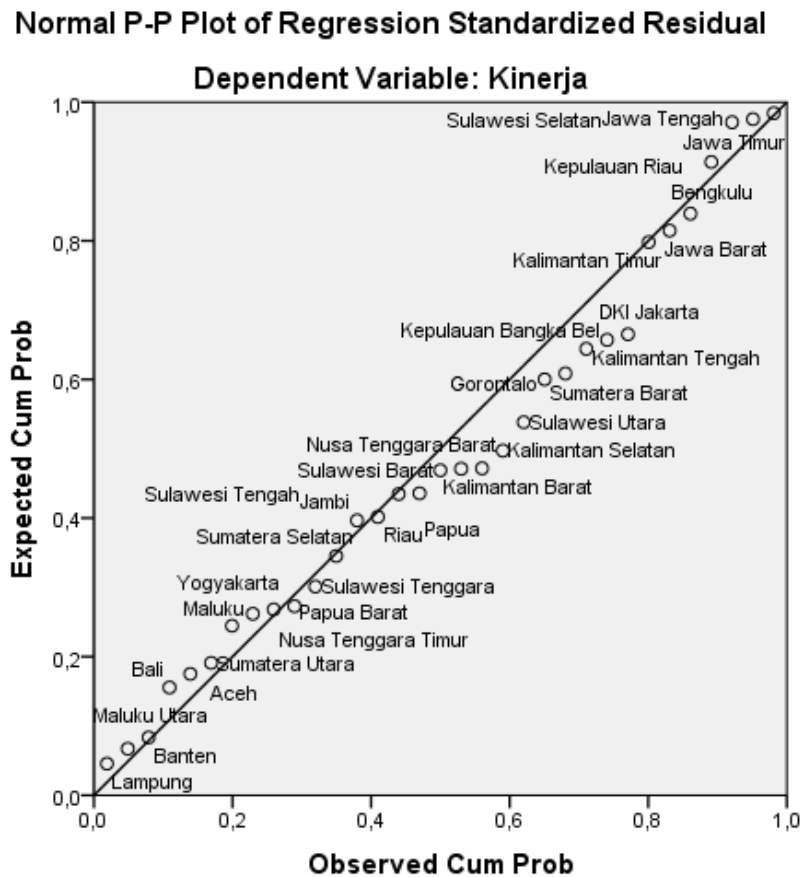
2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006, dalam Ratnasari, 2009). Model regresi yang memenuhi asumsi normalitas yaitu apabila data tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berikut disajikan hasil

output software IMB SPSS V.22 uji normalitas dengan menggunakan uji Normal Grafik P-Plot.

Gambar IV.1
Grafik Uji Normalitas



Sumber: Data Statistik Diolah SPSS V.22

Melihat *output* pada *Normal P-Plot of regression* atau grafik uji normalitas pada gambar IV.1 di atas terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mendekati arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi memiliki distribusi normal, atau memenuhi asumsi normalitas data.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006 dalam Ratnasari, 2009). Berikut ini adalah tabel besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan multikolinieritas pada model regresi:

Tabel IV.2
Besaran Tolerance dan VIF

Model	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0,889	1,125
Efisiensi	0,900	1,111
Efektifitas	0,918	1,089

Sumber: Data Statistik Diolah IMB SPSS V.22

Nilai VIF untuk variabel akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas masing-masing adalah 1,125, 1,111 dan 1,089. Sedangkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel adalah 0,889, 0,900 dan 0,918. Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga variabel bebas tersebut.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) dalam Hanipah (2015) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear

ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,576 ^a	,331	,262	,31969	1,752

a. Predictors: (Constant), efektif, efisien, akun

b. Dependent Variable: scoregg

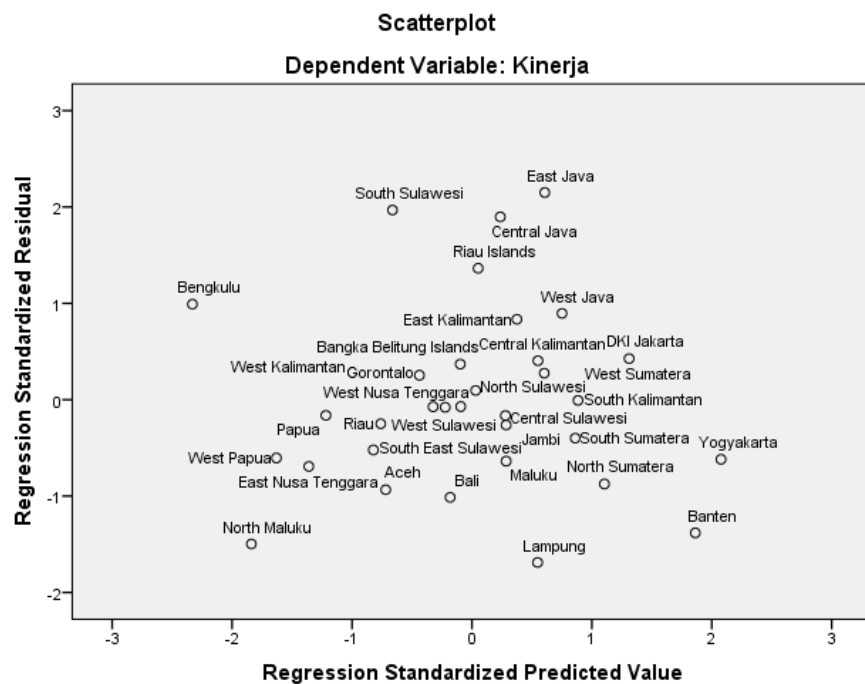
Sumber: Data Statistik Diolah IMB SPSS V.22

Nilai DW pada penelitian ini sebesar 1,752, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel (n) 33 dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai dl: 1,2576 dan du: 1,6511. Nilai dl dan du bisa didapatkan di tabel Durbin Watson yang terdapat pada lampiran dengan kolom n = 33 dan k = 3. Oleh karena itu, nilai DW 1,752 lebih kecil dari 4-du ($4 - 1,6511 = 2,3489$) sehingga $1,6511 < 1,752 < 2,3489$ ($du < dw < 4-du$) maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Ghozali (2006) dalam Ratnasari (2009) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji *heteroskedastisitas* dengan grafik *scatterplots* dapat dilihat dari gambar IV.2 berikut ini:

Gambar IV.2
Grafik Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Statistik Diolah IMB SPSS V.22

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan bantuan *software IMB SPSS V. 22*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.4
Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	,589	,560		1,052	,301			
	Akuntabilitas	,180	,050	,578	3,590	,001	,889	1,125	
	Efisiensi	,096	,053	,290	1,810	,081	,900	1,111	
	Efektifitas	-,010	,063	-,024	-,155	,878	,918	1,089	

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Statistik Diolah IMB SPSS V.22

Persamaan yang dapat diambil berdasarkan tabel di atas merupakan hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Kinerja = 0,589 + 0,180 X_1 + 0,096 X_2 - 0,010 X_3}$$

Nilai konstanta 0,589 mempunyai arti apabila akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas adalah nol, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebesar konstanta 0,589.

Nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,180 mempunyai arti apabila akuntabilitas naik sebesar satu persen, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,180 persen dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai koefisien regresi efisiensi sebesar 0,096 mempunyai arti apabila efisiensi naik sebesar satu persen, maka kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,096 persen dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai koefisien regresi efektifitas sebesar -0,010 mempunyai arti apabila efektifitas naik sebesar satu persen, maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan turun sebesar 0,010 persen dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Keterandalan Model (Uji F)

Uji Keterandalan Model (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006, dalam Ratnasari, 2009). Berikut hasil uji F menggunakan *software IMB SPSS V. 22* dapat dilihat dari tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Hasil Regresi Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,469	3	,490	4,793	,008 ^b
Residual	2,964	29	,102		
Total	4,433	32			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Efektifitas, Efisiensi, Akuntabilitas

Sumber: Data Statistik Diolah IMB SPSS V.22

Nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel IV.5 menyatakan bahwa akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji Regresi Parsial (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006 dalam Ratnasari, 2009). Berikut hasil uji t menggunakan *software IBM SPSS V.22* dapat dilihat dari tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.6
Hasil Regresi Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,589	,560		1,052	,301
Akuntabilitas	,180	,050	,578	3,590	,001
Efisiensi	,096	,053	,290	1,810	,081
Efektifitas	-,010	,063	-,024	-,155	,878

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Statistik Diolah IBM SPSS V.22

1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai prob. t hitung dari variabel bebas Akuntabilitas sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel bebas Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kinerja pada alpha 5% atau dengan kata lain, Indeks Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini Sehingga H_1 diterima. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Putra (2013) yang menemukan bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Tetapi tidak sesuai dengan penelitian Hastoro dan Sunardi (2016) yang menemukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda.

2) Pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Namun berbeda dengan variabel bebas Efisiensi sebesar 0,081 yang lebih besar dari 0,05 sehingga variabel bebas Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kinerja pada alpha 5% atau dengan kata lain, Index Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada taraf keyakinan 95%. Sehingga H_2

ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hanipah dan Dudi (2015) yang menemukan bahwa Efisiensi yang berpengaruh positif dan tidak signifikan.

3) Pengaruh Efektifitas terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sama halnya dengan pengaruh variabel bebas Efektifitas terhadap variabel terikat Kinerja, karena nilai prob. t hitung 0,878 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas Efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kinerja pada alpha 5% atau dengan kata lain, Indeks Efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada taraf keyakinan 95%. Sehingga H_3 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hanipah dan Dudi (2015) yang menemukan bahwa Efisiensi yang berpengaruh positif dan tidak signifikan.

5. Uji Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Tabel IV.7
Hasil Regresi Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,576 ^a	,331	,262	,31969	1,752

a. Predictors: (Constant), Efektifitas, Efisiensi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Statistik diolah SPSS V.22

Jika dilihat dari nilai determinan determinasi (*Adjusted R-Square*) yang besarnya 0,262 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas terhadap variabel Kinerja sebesar 26,2%. Artinya, Index Akuntabilitas, Efisiensi dan Efisiensi memiliki proporsi pengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 26,2% sedangkan sisanya 73,80% (100% - 26,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil uji F dengan signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas berpengaruh dan signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini, menjelaskan meningkatnya Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas akan meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Hasil uji t menyatakan bahwa secara parsial variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dan nilai regresi 0,180. Sedangkan Efisiensi berpengaruh positif dan tidak signifikan serta Efektifitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
3. Hasil uji koefisien determinasi menyatakan bahwa variabel Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas terhadap variabel Kinerja sebesar 26,2%. Artinya, Index Akuntabilitas, Efisiensi dan Efisiensi memiliki proporsi pengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 26,2% sedangkan sisanya 73,80% (100%

- 26,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya mengambil 3 dari 6 prinsip yang Kemitraan anggap paling sesuai dengan kondisi sosial-politik Indonesia. Tiga prinsip itu yang kemudian dijadikan variabel independen. Namun, masih banyak variabel independen yang dapat digunakan yaitu Partisipasi, Keadilan dan Transparansi.
2. Penelitian ini menggunakan EKPPD tahun 2014 untuk LPPD 2012 dan Indeks Tata kelola Pemerintahan Indonesia dalam IGI tahun 2012. Hal ini disebabkan karena data terbaru yang dikeluarkan Indonesia Governance Index adalah data pada tahun 2012 dan belum mengeluarkan untuk tahun 2016.

C. Saran

Dari beberapa keterbatasan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian-penelitian berikutnya:

1. Prinsip dalam Kemitraan yang diambil menjadi variabel penelitian hanya 3, yaitu Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas. Untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan keenam prinsip tersebut. Serta

menggunakan periode terbaru. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih relevan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada penelitian ini terbatas hanya pada indeks IGI. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya juga menggunakan komponen lain dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyangkut ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan audit.

Daftar Pustaka

- Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ani, Ni Luh Nana Putri dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Universitas Udayana*. Vol. 6, No. 3:481-497.
- Assidiqi, Bahrun. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Darwanis dan Sephi Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 2:150-174.
- Hanipah, Septiani dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Bandung Periode 2009-2013). *E-Proceeding of Management*. Vol.2, No.3 Desember 2015.
- Hasthoro, Handoko A, Henry Sarnowo dan Nurwiyanta. 2016. The Impact of Financial Condition on Public Governance among Provincial Government in Indonesia. *Proceedings International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics & Call For Papers (ICOBAME)*. Magelang. No. 478-484.
- Hasthoro, Handoko A, Sunardi. 2016. Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume XIX No. 1.
- Heriningsih, Sucahyo. 2014. Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Paradigma*. Vol. 18, No. 2:29-41.
- Julitawati, Ebit, Darwanis dan Jalaludin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1:15-29.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriarsari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi*.

Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kaupaten Blora Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.

Putra, Deki. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 02, No. 02:138-150.

Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.

2008. Pedoman Umum Good Public Governance.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 – 251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2012.

<http://otda.kemendagri.go.id>. Data diunduh Tahun 2016. Laporan EKPPD 2014 untuk LPPD 2012

Lampiran I
Peringkat dan Status Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan 33 Provinsi Secara Nasional

No.	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Provinsi Jawa Timur	1	3.0576	Sangat Tinggi
2	Provinsi Jawa tengah	2	2.8963	Tinggi
3	Provinsi Sulawesi Selatan	3	2.7260	Tinggi
4	Provinsi Jawa Barat	4	2.6934	Tinggi
5	Provinsi Kepulauan Riau	5	2.6900	Tinggi
6	Provinsi DKI Jakarta	6	2.6620	Tinggi
7	Provinsi Kalimantan Timur	7	2.5914	Tinggi
8	Provinsi D. I. Yogyakarta	8	2.4930	Tinggi
9	Provinsi Kalimantan Tengah	9	2.4894	Tinggi
10	Provinsi Sumatera Barat	10	2.4612	Tinggi
11	Provinsi Kalimantan Selatan	11	2.4338	Tinggi
12	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	2.3393	Tinggi
13	Provinsi Sumatera Selatan	13	2.2961	Tinggi
14	Provinsi Sulawesi Utara	14	2.2822	Tinggi
15	Provinsi Sulawesi Tengah	15	2.2540	Tinggi
16	Provinsi Gorontalo	16	2.2263	Tinggi
17	Provinsi Jambi	17	2.2188	Tinggi
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	18	2.1986	Tinggi

19	Provinsi Sumatera Utara	19	2.1965	Tinggi
20	Provinsi Banten	20	2.1961	Tinggi
21	Provinsi Sulawesi Barat	21	2.1653	Tinggi
22	Provinsi Kalimantan Barat	22	2.1457	Tinggi
23	Provinsi Maluku	23	2.1043	Tinggi
24	Provinsi Bengkulu	24	2.0580	Tinggi
25	Provinsi Riau	25	1.9955	Sedang
26	Provinsi Papua	26	1.9259	Sedang
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	27	1.8989	Sedang
28	Provinsi Bali	28	1.8767	Sedang
29	Provinsi Lampung	29	1.8189	Sedang
30	Provinsi Aceh	30	1.7867	Sedang
31	Provinsi Nusa Tenggara Timur	31	1.7313	Sedang
32	Provinsi Papua Barat	32	1.6992	Sedang
33	Provinsi Maluku Utara	33	1.3720	Sedang

Sumber: otda.kemendagri.go.id

Lampiran II

Kinerja 33 Provinsi Menurut Indonesia Governance Index

No.	Nama Pemerintah Daerah	Indeks Akuntabilitas	Indeks Efisiensi	Indeks Efektifitas
1	Provinsi D. I. Yogyakarta	8,37	6,70	5,88
2	Provinsi Jawa Timur	5,73	8,43	6,40
3	Provinsi DKI Jakarta	7,49	6,47	4,15
4	Provinsi Jambi	5,86	7,51	6,79
5	Provinsi Bali	5,04	7,81	4,83
6	Provinsi Sumatera Selatan	6,33	7,88	6,49
7	Provinsi Kalimantan Selatan	6,38	7,66	4,73
8	Provinsi Riau	4,34	7,90	5,49
9	Provinsi Sulawesi Utara	6,19	6,25	6,04
10	Provinsi Lampung	6,01	7,89	7,56
11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4,91	8,37	6,11
12	Provinsi Kalimantan Tengah	5,97	7,74	5,27
13	Provinsi Sumatera Utara	6,52	7,91	4,95
14	Provinsi Sulawesi Barat	5,41	7,18	6,37
15	Provinsi Jawa Barat	5,73	8,68	5,70
16	Provinsi Jawa Tengah	5,17	8,61	5,96
17	Provinsi Banten	7,52	7,69	4,64
18	Provinsi Aceh	3,79	9,05	5,76
19	Provinsi Nusa Tenggara Barat	5,60	6,97	4,96
20	Provinsi Sumatera Barat	6,32	7,23	5,56

21	Provinsi Sulawesi Selatan	5,80	5,44	6,06
22	Provinsi Kalimantan Timur	4,91	9,25	4,42
23	Provinsi Gorontalo	5,48	6,50	5,67
24	Provinsi Kepulauan Riau	5,10	8,19	4,56
25	Provinsi Sulawesi Tengah	6,11	6,97	6,21
26	Provinsi Kalimantan Barat	4,95	7,64	4,62
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	4,89	6,65	4,67
28	Provinsi Maluku	5,15	8,96	7,97
29	Provinsi Papua	3,43	8,49	4,52
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,72	5,80	4,96
31	Provinsi Bengkulu	3,98	5,01	4,79
32	Provinsi Papua Barat	2,46	9,40	4,63
33	Provinsi Maluku Utara	4,18	5,69	4,41

Sumber: www.kemitraan.or.id